

# IMPLEMENTASI GREEN ACCOUNTING OLEH PEMERINTAH DAERAH (STUDI KOMPARASI BERDASARKAN PERSEPSI APARATUR PEMERINTAH)

Yuni Rimawati

Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura  
Jl. Raya Telang PO.BOX 02 Kamal

Email: rimawati.unicq@gmail.com

## ABSTRACT

*Through UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), countries in the world have agreed to stabilize the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. This agreement is the birth of the Kyoto Protocol. Based on the kyoto protocol the Indonesian government issued regulation 61/2011 on a national action plan in decreasing greenhouse gases RAN-GRK) and regulation 71/2011 on the implementation of an inventory of national greenhouse gases. Both regulations as legalization preservation of the environment in development activities. To introduce and spread this idea in the planning of the local government, Ministry of national development planning/Bappenas has done green economy training for local government official. This research aims to conduct empirical test about local government sensitivity to the environment outlined in development program through their activities with proxies green accounting. Variables that were used in this research: environmental awareness, environmental involvement, environmental reporting, and environmental audit. Based on the statistical result of this study, it can be concluded that there are no differences of perception in variable environmental awareness, environmental involvement, environmental reporting and environmental audits on local government officials in Java and Madura with outside Java and Madura.*

**Keywords:** *green accounting; development program of local government*

## ABSTRAK

Melalui UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), negara-negara di dunia sepakat untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Kesepakatan ini melahirkan Protokol Kyoto. Berdasarkan Protokol Kyoto Pemerintah Indonesia menerbitkan PP Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) serta PP Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Kedua peraturan tersebut sebagai bentuk legalisasi penjagaan dan pelestarian lingkungan hidup dalam proses pembangunan. Guna mengenalkan dan menyebarkan gagasan ini, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah melaksanakan Diklat perencanaan *green economy* bagi aparatur pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan uji empiris tentang kepekaan Pemerintah Daerah Berdasarkan persepsi aparaturnya terhadap lingkungan yang dijabarkan dalam pembangunan melalui program kegiatannya dengan ukuran (*proxy*) *green accounting*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran lingkungan (*environmental awareness*), keterlibatan dalam masalah lingkungan (*environmental involvement*), pelaporan permasalahan lingkungan (*environmental reporting*) dan audit lingkungan (*environmental audit*). Berdasarkan uji statistik pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi pada variabel *environmental awareness, environmental involvement, environmental reporting* dan *environmental audit* pada aparatur pemerintah daerah di Jawa dan Madura dengan diluar Jawa dan Madura.

**Kata kunci:** *green accounting; program kegiatan pemerintah daerah*

## PENDAHULUAN

Topik lingkungan pada saat ini banyak menjadi fokus penelitian dan kebijakan (Gibassier et al., 2011). Berdasarkan Hansen dan Mowen (2009), terdapat dua alasan utama peningkatan minat akuntansi terhadap lingkungan, yaitu: (1) peraturan lingkungan yang ditetapkan oleh negara semakin ketat; (2) keberpihakan terhadap lingkungan semakin menjadi isu yang kompetitif.

Kepedulian terhadap lingkungan juga mempengaruhi akuntansi sebagai ilmu sosial dan melahirkan *Green Accounting* atau Akuntansi Lingkungan (Astuti, 2012). Terdapat pula istilah lain yang merujuk *green accounting*, yaitu *Sustainability Accounting* (Susilo, 2008) dan *Environmental Accounting Disclosure* (Lindrianasari, 2007). Susilo (2008) menjelaskan, *green accounting* sebenarnya berasal dari konsep *Socio Economic Environmental Accounting* (SEEC). Konsep SEEC adalah konsep yang lahir dari sektor private yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan sehingga dapat meningkatkan nilai pemegang saham (Wiedmann dan Manfred, 2006).

Berdasarkan *World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam Darmanto (2011), memasukkan isu lingkungan dalam wacana pembangunan melalui konsep *Sustainability Development* akan melahirkan laporan *Environmental Managerialism*. Sehingga akan terjadi kerjasama antara peneliti, politisi, administrator dan birokrat untuk peduli terhadap lingkungan (Escobar, 1996 dalam Darmanto, 2011).

Pada tingkat regulator/pemerintah, kesepakatan Internasional tentang penyelamatan dan keberlangsungan lingkungan adalah dengan adanya Konvensi Perubahan Iklim atau UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Konvensi perubahan iklim adalah sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Ketentuan spesifik tentang mekanisme pengurangan gas GRK pada Konvensi Perubahan Iklim disepakati dalam Conference of the Parties (COP) ke 3 yang melahirkan Protokol Kyoto.

Berdasarkan kesepakatan Internasional tersebut, maka pemerintah Indonesia menerbitkan PP Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) serta PP Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Kedua PP ini adalah bentuk nyata keterlibatan pemerintah Indonesia akan isu lingkungan dalam program/kegiatan APBN/D. Seluruh kegiatan yang terdapat dalam APBN/D merupakan alokasi biaya terhadap program pemerintah guna menjalankan fungsinya.

Pengertian umum akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan dan pelaporan kejadian ekonomi oleh suatu entitas. Entitas ini dapat berupa entitas privat (perusahaan) dan entitas publik (pemerintah/lembaga publik lainnya). Berdasarkan konsep Sustainability Development, program pemerintah yang sejalan dengan *green accounting* adalah RAN-GRK. RAN-GRK tidak dapat dipisahkan dari konsep *green economy*. *Green economy* berdasarkan United Nations Environment Programme (UNEP) dapat dinyatakan sebagai pengembangan ekonomi yang didasarkan pada prinsip rendah karbon, efisiensi sumberdaya, dan inklusif sosial (Siswanto dan Assa, 2013). Menurut Fauzi (2012) dalam Siswanto dan Assa (2013) implementasi *green economy* memandang ekonomi dan lingkungan adalah 2 hal yang seharusnya berjalan selaras, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak harus berdampak negatif pada lingkungan dan juga sebaliknya, penyelamatan lingkungan tidak akan menghambat ekonomi.

Berdasarkan penjelasan visi-misi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional – (PPN/Bappenas) proses perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, baik berupa RPJMN maupun RKP. Sedangkan tujuan kedua, terkait dengan tugas-tugas lain (penugasan khusus) yang diberikan Presiden atau Pemerintah kepada Kementerian PPN/Bappenas.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan un-

tuk mencapai tujuan tersebut adalah diklat non gelar *Green Economy*. Secara umum Pendidikan dan latihan *green economy* ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur pemerintah daerah mengenai *green economy*, khususnya dalam penyusunan RAD GRK.

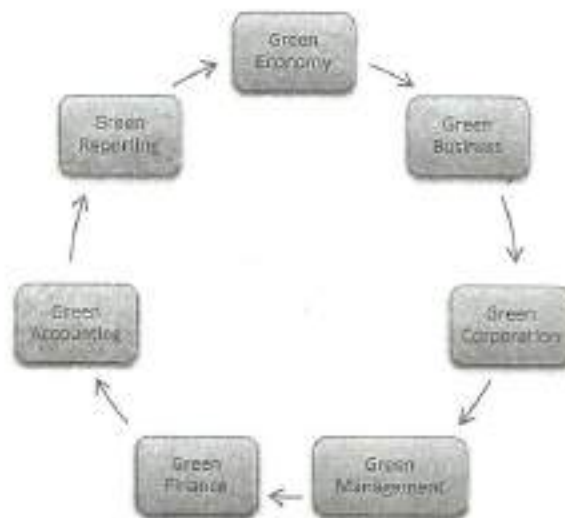
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan akuntansi lingkungan tidak hanya menjadi fokus sektor privat (entitas perusahaan) tetapi juga sektor publik. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana kepekaan Pemerintah Daerah terhadap lingkungan dijabarkan dalam pembangunan melalui program kegiatannya dengan ukuran (proxy) *green accounting*. Penelitian ini melakukan uji beda terhadap sampel pemerintah daerah di Jawa dan Madura dan pemerintah daerah diluar Jawa dan Madura. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji implementasi *green accounting* pada sektor privat, data yang digunakan oleh penelitian ini merupakan implementasi *green accounting* berdasarkan persepsi aparat pemerintah daerah.

## STUDI LITERATUR

### Kajian *Green Accounting* dalam Lingkup Pemerintah Daerah

*Green accounting* atau akuntansi lingkungan merupakan hasil adaptasi akuntansi dalam kajian sosial yang dipengaruhi perkembangan cara pandang dan lingkungan bisnis. Sehingga akuntansi lingkungan merupakan bentuk partisipasi dengan meningkatnya kepekaan dampak lingkungan akibat kegiatan ekonomi. Pengertian akuntansi lingkungan menurut Institute of Management Accountant (IMA) adalah proses identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya-biaya lingkungan dan pengintegrasian hal tersebut terhadap keputusan bisnis dan informasi yang disampaikan pada stakeholders.

KTT Bumi Rio+20 (Rio de Janeiro, Juni 2012) menyepakati Agenda Green Economy untuk mewujudkan Sustainable Development dan penghapusan kemiskinan (Lako, 2013). Agenda Green Economy tersebut melahirkan gerakan Green Business, Green Corporation, Green Management, Green Finance, dan Green Accounting.



Gambar 1. Relasi Green Economy dengan Green Accounting, Sumber Lako (2013)

Dalam sektor privat implementasi *green accounting* di Indonesia, telah ada standar pengungkapan akuntansi lingkungan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 32 dan 33. Sedangkan peraturan lainnya adalah UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian terdapat juga nota kesepahaman antara KLH dengan BI telah

sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005 tentang green banking (Susilo, 2008).

Peran serta pemerintah dalam menjaga lingkungan diwujudkan dalam perundang-undangan dan juga program/kegiatan yang dijalankan. PP Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah

Kaca (RAN-GRK) serta PP Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional adalah bentuk nyata keterlibatan pemerintah Indonesia dalam program/kegiatan pemerintah yang dianggarkan dalam APBN/D.

Kedua PP tersebut memberikan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat dalam melaksanakan berbagai kegiatan/program untuk mengurangi emisi GRK dalam periode tahun 2010-2020 (Bappeda Propinsi Sumatera Selatan, 2012). Berdasarkan PP No 61 Tahun 2011, kegiatan RAD-GRK bertujuan untuk menyusun dokumen kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah yang tertuang di RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RTRWP/K (Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota) dan Rencana Strategis SKPD terutama sektor yang berhubungan langsung dengan emisi gas rumah kaca (Bappeda Propinsi Sumatera Selatan, 2012).

#### **Green Accounting dalam Program/Kegiatan Pemerintah Daerah**

Program dan kegiatan pemerintah (termasuk pemerintah daerah) adalah bentuk pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dibiayai oleh dana APBN/D. Program dan kegiatan ini adalah penggunaan sumberdaya oleh pemerintah guna menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang jasa (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Sehingga bagaimana pelayanan dan perhatian pemerintah akan suatu "hal" dapat tercermin dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas

umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Sehingga segala bentuk program dan kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah akan melalui alur proses tersebut.

APBD disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Salah satu pedoman tersebut adalah sinkronisasi dengan kebijakan Pemerintah Pusat. RKPD adalah penjabaran RPJMD. Sehingga jika Pemerintah Daerah telah mengakomodasi amanat PP Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) maka program dan kegiatan yang dilaksanakannya juga akan mencerminkan hal tersebut. Dalam PP Nomor 61 Tahun 2011 terdapat acuan untuk Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah. Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Rencana aksi pengurangan emisi GRK meliputi berbagai aktivitas mitigasi untuk mengurangi secara signifikan emisi GRK yang ditimbulkan dan sekaligus meningkatkan peranan sebagai penyerap GRK. Kegiatan inti untuk menurunkan emisi GRK meliputi 5 bidang, yaitu: pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri, serta pengelolaan limbah. Sedangkan kegiatan penurunan emisi GRK diatur dalam Peraturan presiden No 71 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca di daerah (Bappeda Propinsi Sumatera Selatan, 2012).

## RERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengenalan green accounting sebenarnya timbul karena pemikiran phallogocentric sistem akuntansi, maksudnya jika tidak melakukan apapun untuk mencegah krisis lingkungan hidup saat ini, maka bisa membuat masalah menjadi lebih buruk (Cooper, 1992). Sehingga berdasarkan tujuan akuntansi yaitu melakukan pencatatan dan melaporkan keuangan guna mengamankan kepentingan shareholders maka green accounting tidak hanya relevan diimplementasikan pada sektor privat tetapi juga para sektor publik. Sektor publik yang menjadi fokus penelitian ini adalah pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN GRK adalah dasar hukum dan pedoman pemerintah daerah dalam menyusun program/kegiatan yang pro lingkungan. Latar belakang hal ini menurut Darajati, (2012) adalah : 1) komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK sebagai kontribusi kepada penurunan emisi GRK global; 2) Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, hal ini disebabkan karena kondisi Indonesia negara kepulauan dan kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada sumber daya alam kepulauan dan kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada sumber daya alam kepulauan dan kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada sumber daya alam; 3) Sebagai salah satu upaya untuk mencapai pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan; 4) Perlu respon untuk melakukan mitigasi dan adaptasi iklim, sehingga masyarakat siap untuk menyesuaikan perubahan perubahan yang terjadi akibat perubahan iklim (low carbon development & perubahan behavior).

Pengukuran implementasi green accounting yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengukuran dan variabel yang digunakan oleh Susilo (2008). Variabel-variabel tersebut adalah kesadaran lingkungan (environmental awareness), keterlibatan dalam masalah lingkungan (environmental involvement), pelaporan permasalahan lingkungan (environmental reporting) dan audit lingkungan (environmental audit). Sehingga penelitian ini akan menguji beda implementasi green accounting berdasar-

kan persepsi aparat pemerintah daerah wilayah Jawa dan Madura dengan pemerintah daerah di luar Jawa dan Madura.

## METODE PENELITIAN

Guna sosialisasi dan implementasi RAN GRK dalam program/kegiatan pemerintah daerah, Bappenas melaksanakan Diklat Non Gelar Green Economy dengan bekerja sama dengan institusi-institusi pendidikan. Salah satu penyelenggara yang ditunjuk Bappenas adalah Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo. Responden penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah peserta Diklat Non Gelar Green Economy yang diselenggarakan oleh Bappenas dan Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo.

Pemilihan responden ini berdasarkan pertimbangan, bahwa peserta Diklat Non Gelar Green Economy adalah aparat pemerintah daerah yang dikirim oleh instansinya dan atau ditunjuk Bappenas berdasarkan tupoksinya dalam implementasi RAN GRK dalam program/kegiatan pemerintah daerah. Selain itu setelah mengikuti Diklat Non Gelar Green Economy responden dianggap memahami konsep green economy dan mampu memberikan respon yang diharapkan pada pernyataan kuesioner penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner. Kuesioner diberikan langsung kepada para responden dan melalui surat elektronik (email). Kuisisioner diberikan langsung pada peserta Diklat Non Gelar Green Economy angkatan III yang diselenggarakan oleh Bappenas dan Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo yang dilaksanakan pada Tanggal 01-12 September 2014. Pengisian kuesioner dilakukan pada tanggal 11 September dengan waktu khusus yang dikoordinasikan dengan panitia. Peserta Diklat Non Gelar Green Economy angkatan III berjumlah 21 orang dan seluruhnya mengembalikan kuesioner. Sedangkan kuisisioner kepada peserta Diklat Non Gelar Green Economy yang diselenggarakan oleh Bappenas dan Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo angkatan I dan II dikirim melalui surat elektronik. Hanya 3 responden yang mengembalikan kuisisioner melalui surat elektronik dan 1 kuisisioner tidak diisi secara lengkap.

## Operasionalisasi Variabel

Sadar sama dengan tahu, sehingga pengetahuan tentang hal yang nyata, konkret adalah pengetahuan yang mendalam, tahu sungguh-sungguh, dan tidak salah akan tindakan/perilaku (Musyarofah, 2013). Sehingga kesadaran lingkungan (*environmental awareness*) adalah pemahaman tentang tindakan merusak lingkungan atau mendukung terciptanya kelestarian lingkungan hidup. Pengukuran variabel kesadaran lingkungan (*environmental awareness*) merupakan modifikasi dari Susilo (2008) dengan mengacu pada Jamahani (2003) serta Teoh dan Thong (1986). Modifikasi ini dilakukan karena Susilo (2008), Jamahani (2003), serta Teoh dan Thong (1986) mengukur implementasi *green accounting* pada sektor privat.

Kesadaran lingkungan (*environmental awareness*) dalam penelitian ini diukur dengan 5 pernyataan. Ukuran Kesadaran lingkungan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Filosofi dari pimpinan daerah; (2) Adanya sugesti dari daerah lain; (3) Adanya sugesti dari diri sendiri (daerah sendiri); (4) Adanya sugesti dari masyarakat; (5) Adanya sugesti dari lembaga lingkungan hidup seperti WALHI.

Bentuk keterlibatan lingkungan (*environmental involvement*) dapat dijelaskan melalui berbagai bentuk aktivitas perusahaan seperti program pembangunan/pengembangan komunitas, pelayanan komunitas, dan pemberdayaan komunitas (Anantan, *nd*). Pengukuran variabel keterlibatan lingkungan dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari Jamahani (2003) dalam Teoh dan Thong (1986) dan Susilo (2008).

Variabel keterlibatan lingkungan dalam penelitian ini diukur dengan 4 pernyataan. Pernyataan tersebut adalah: (1) Keberadaan unit lingkungan hidup dalam pemerintah daerah; (2) Ketersediaan dana untuk perlindungan lingkungan hidup; (3) Ketersediaan program atau prosedur yang mengurangi konsumsi sumber daya alam; (4) Ketersediaan studi keselamatan lingkungan hidup jika instansi (pemerintah daerah) melakukan kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan.

Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun sisten informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan (Sari dan Hadiprajitno, 2013). Sehingga pelapo-

ran tersebut merupakan alat pembelajaran organisasi, yang dapat menyebabkan perubahan dinamis terhadap individu maupun entitas, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kinerja organisasi (Musyarofah, 2013). Pengukuran variabel akuntansi lingkungan (*environmental reporting*) dalam penelitian ini merupakan modifikasi dari Dunk (2002) dalam Susilo (2008) dan Sari dan Hadiprajitno (2013).

Variabel akuntansi lingkungan dalam penelitian ini diukur dengan 6 pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut adalah: (1) Terdapat proses pengurangan atau pembatasan limbah dalam kegiatan pembangunan; (2) Penelusuran terhadap biaya aktivitas lingkungan; (3) Terdapat pertimbangan aspek lingkungan dalam keputusan investasi ataupun pembangunan; (4) Proses pembangunan dipengaruhi oleh pertimbangan aspek lingkungan; (5) Selalu berusaha untuk memenuhi standar lingkungan hidup; (6) Selalu berusaha untuk mematuhi standar lingkungan hidup.

*Environmental Audit* (audit lingkungan) diperlukan untuk memastikan apakah kinerja program konservasi lingkungan hidup yang dilakukan entitas sudah berjalan efektif dan efisien. Variabel audit lingkungan dalam penelitian ini diukur dengan 3 pernyataan. Pernyataan guna pengukuran variabel audit lingkungan pada penelitian ini merupakan menggunakan pengukuran yang dikembangkan oleh Susilo (2008). Pernyataan tersebut adalah: (1) Terdapat pemeriksaan dari instansi terkait atas kegiatan yang berdampak lingkungan; (2) Terdapat pemeriksaan atas kinerja pemerintah daerah yang terkait dengan kelestarian dan keselamatan lingkungan hidup sekitar; (3) Hasil pemeriksaan kinerja lingkungan tersebut menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam aktivitas berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan menguji apakah terdapat perbedaan atas preferensi pada pemerintah daerah di Jawa dan Madura dengan pemerintah daerah di luar Jawa dan Madura atas: kesadaran lingkungan (*environmental awareness*), keterlibatan lingkungan (*environmental involvement*), akuntansi lingkungan (*environmental reporting*), dan audit lingkungan (*Environmental Audit*). Tujuan penelitian ini terkait dengan perbedaan hal-hal yang mempengaruhi kualitas lingkungan dimana

keadaannya yang jauh berbeda antara daerah di Jawa dan Madura dengan daerah di luar Jawa. Keadaan ini juga diduga akan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah. Keadaan seperti: kepadatan penduduk, luas hutan, daerah industri, ketersediaan lahan pertanian, eksplorasi lahan, lahan terbuka hijau, akses pada hasil pembangunan dan kesiapan aparat pemerintah.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tersedia 23 responden sebagai data guna pengujian pada penelitian ini. Dari 23 responden tersebut, 13 responden berasal dari Jawa/Madura dan 10 responden berasal dari luar wilayah Jawa/Madura. Tabel 1 merupakan gambaran karakter demografi responden secara umum.

Tabel 1. Karakteristik Demografi Responden

Lama Bekerja pada Instansi saat ini			
	< 3thn	3-5 thn	> 5 thn
Frekuensi	3	7	13
Usia			
	30	30-40	> 40
Frekuensi	2	14	7
Pendidikan Terakhir			
	d1/d2/d3	d4/s1	s2/s3
Frekuensi	0	16	7

Analisis data pada penelitian ini menggunakan program SPSS. Sedangkan guna menjawab pertanyaan penelitian ini menggunakan menggunakan teknik Mann Whitney U test. Teknik pengujian ini dipilih karena pengujian 2 sampel independent yang menjadi tujuan penelitian ini dengan data yang dimiliki dinilai tidak normal

(jumlah data yang tersedia untuk melakukan uji statistik sangat terbatas). Hal ini didukung pengujian statistik deskriptif pada data secara keseluruhan, dengan jumlah data kecil, simpangan rata-rata (standar deviasi) cukup besar (Tabel 2). Pada tabel 2 juga terlihat sebaran mean (nilai rata-rata) dengan nilai minimum dan maximum,

Tabel 2. Hasil Uji Statistik tentang Sebaran Data

Descriptive Statistics					
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
swara	23	10.98	2.440	15	24
invol	23	16.17	2.634	11	20
report	23	23.39	3.299	14	29
audit	23	11.65	2.124	6	15
kategori	23	1.43	.607	1	2

### Ranks

	kategori	N	Mean Rank	Sum of Ranks
swara	Jawa-Madura	13	13.23	172.00
	Luar Jawa-Madura	10	10.40	104.00
	Total	23		
invol	Jawa-Madura	13	13.27	172.50
	Luar Jawa-Madura	10	10.35	103.50
	Total	23		
report	Jawa-Madura	13	12.15	158.00
	Luar Jawa-Madura	10	11.80	118.00
	Total	23		
audit	Jawa-Madura	13	12.35	160.50
	Luar Jawa-Madura	10	11.55	115.50
	Total	23		

Analisis statistik menggunakan tingkat keyakinan 95% (cronbach alfa 5%). Hal ini berarti perbedaan rata-rata pada 2 sampel

dikatakan signifikan secara statistik jika, nilai  $p$  value 2-tailed  $< 0,05$ . Hasil output dari pengujian SPSS dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Guna Menjawab Hipotesis

Test Statistics <sup>b</sup>				
	aware	invol	report	audit
Mann-Whitney U	49.000	48.500	63.000	60.500
Wilcoxon W	104.000	103.500	118.000	115.500
Z	-1.005	-1.039	-.126	-.286
Asymp. Sig. (2-tailed)	.315	.299	.900	.775
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.343 <sup>a</sup>	.313 <sup>a</sup>	.927 <sup>a</sup>	.784 <sup>a</sup>

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: kategori

Berdasarkan hasil pengujian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio jawaban dari responden yang berasal dari Jawa/Madura dan responden berasal dari luar wilayah Jawa/Madura pada seluruh variabel penelitian. Kesimpulan ini berdasarkan pada nilai  $p$  value

2-tailed  $> 0,05$  (Tabel 4). Hasil penelitian ini tidak dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya karena belum ada hasil empiris (penelitian sebelumnya) yang mempunyai fokus dan kajian yang sama dengan penelitian ini.

Tabel 4. Kesimpulan Pengujian Hipotesis

Variabel (Yang dibandingkan)	Notasi	$p$ value 2-tailed	Kesimpulan (Perbedaan)
<i>Environmental awareness</i>	aware	0,315	Tidak Signifikan
<i>Environmental involvement</i>	invol	0,299	Tidak Signifikan
<i>Environmental reporting</i>	report	0,900	Tidak Signifikan
<i>Environmental Audit</i>	audit	0,775	Tidak Signifikan

## SIMPULAN DAN SARAN

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan akan kesadaran lingkungan (*environmental awareness*), keterlibatan lingkungan (*environmental involvement*), akuntansi lingkungan (*environmental reporting*), dan audit lingkungan (*Environmental Audit*) pada Pemerintah Daerah di Jawa/Madura dan Pemerintah Daerah diluar Jawa/Madura (berdasarkan persepsi aparaturanya). Hasil ini dapat diakibatkan karena responden tidak mengungkapkan hal yang sebenarnya pada setiap pengukuran penelitian. Sebenarnya hal ini sudah diminimalisasi dengan tidak mencantumkan nama responden, tetapi kemungkinan responden masih merasa kekhawatiran terhadap pengungkapan substansi penelitian (item-item pengukuran untuk setiap variabel) seperti yang dihadapi Susilo (2008). Hal ini dimungkinkan karena responden penelitian adalah pe-

serta diklat non green economy, dimana mereka adalah aparatur pemerintah daerah yang dikirim oleh institusi untuk diklat tersebut dan pengisian kuisioner dilakukan pada saat diklat.

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan yang pertama adalah pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah modifikasi pengukuran implementasi green accounting dari penelitian sebelumnya yang digunakan untuk mengukur sektor privat. Walaupun telah melalui uji validitas dan reliabilitas, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pengukuran yang lebih komprehensif tentang implementasi green accounting pada sektor publik, khususnya pemerintah daerah.

Keterbatasan kedua adalah data yang digunakan dalam pengujian statistik sangat sedikit. Hal ini telah diatasi dengan pengujian statistis



non parametrik. Ini merupakan celah bagi penelitian selanjutnya, jika dapat mengakses data dengan jumlah besar maka dapat melakukan uji statistik parametrik.

Keterbatasan ketiga adalah responden pada penelitian ini kemungkinan memberikan jawaban yang diinginkan bukan yang terjadi sesungguhnya (real) pada saat mengisi kuesioner. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada saat responden mengisi kuesioner, responden juga mengkonfirmasi jawaban dengan responden lain. Kemungkinan hal ini sebagai bentuk kekuatiran akan penilaian buruk pemerintah daerah/instansi yang bersangkutan. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menerapkan metode lain, contohnya Mixed methods (metode penelitian dengan menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif).

## DAFTAR PUSTAKA

- Anatan, Lina. nd. *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia*. [http://www.google.com/url?sa=t&rc=j&q=&csrc=s&source=web&cd=66&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAFODw&url=http%3A%2F%2Fmajour.maranatha.edu%2Findex.php%2Fjurnal-manajemen%2Farticle%2Fview%2F220%2Fpdf&ei=dmNYVNTPLIW8uAT6w4KAAg&usq=AFQjCNEkWOCYXBbwk5z04vzEaMsD\\_6WB8Q&bvm=bv.78677474,d.c2E](http://www.google.com/url?sa=t&rc=j&q=&csrc=s&source=web&cd=66&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAFODw&url=http%3A%2F%2Fmajour.maranatha.edu%2Findex.php%2Fjurnal-manajemen%2Farticle%2Fview%2F220%2Fpdf&ei=dmNYVNTPLIW8uAT6w4KAAg&usq=AFQjCNEkWOCYXBbwk5z04vzEaMsD_6WB8Q&bvm=bv.78677474,d.c2E). Diakses 24 September 2014.
- Astuti, Neni. 2012. Mengenal Green Accounting. *PERMANA – Vol. IV No.1*. Agustus 2012.
- Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Sumatera Selatan*. 2012. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Propinsi Sumatera Selatan.
- Cooper, C. 1992. The Non and Nom of Accounting for (m)other Nature. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 5 No.3, pp. 16- 39.
- Darajati, Wahyuningsih. 2012. *Implementasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*. Diskusi Panel Perubahan Iklim IESR. Jakarta. 26 Desember 2012
- Darmanto. 2011. Konservasi Global, Taman Nasional dan Praktek Lokal di Pulau Siberut Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Kehutanan* Vol. V No 1 Januari Maret 2011
- Dunk, A.S. (2002). "Product Quality, Environmental Accounting and Quality Performance". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 15 No. 5, pp. 719-732. MCB Up Limited.
- Gibassier, Delphine, Stefan Schaltegger, dan Dimitar Zvezdov. 2011. *Environmental Management Accounting: A Bibliometric Literature Review*. *Centre for Sustainability Management (CSM)*; Mei 2011 ISBN 978-3-935630-98-6
- Islam, Muhammad and Dellaportas, Steven 2011, Perceptions of Corporate Social and Environmental Accounting and Reporting Practices from Accountants in Bangladesh. *Social Responsibility Journal*, vol. 7, no. 4, pp. 649-664.
- Jahamani, Yousef F. 2003. Green Accounting in Developing Countries: The Case of UAE and Jordan. *Managerial Finance* Vol. 29 No. 8 2003
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2011. *Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*
- Lako, Andréas. 2013. *Transformasi Akuntansi Menuju Akuntansi Berkelanjutan: Tantangan dan Strategi Pendidikan Akuntansi*. *Workshop Bidang Governance SNA XVI dengan tema "Pengajaran Corporate Governance dan Perkembangan CG Skoring"*. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado, 25 September 2013
- Muhi, Ali Hanapih. Nd. *Pemanasan Global (Global Warming)*. <http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wp-content/uploads/2011/12/PEMANASAN-GLOBAL.pdf> Diakses 10 Oktober 2014.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional*

- Raouf, Mohamed A. 2008. *Climate Change Threats, Opportunities and The GCC Countries*. The Middle East Institute Policy Brief No. 12 April 2008
- Rosiyadi, Didi, Nana Suryana, Ade Cahyana, dan Nuryani. 2007. *E-Government Dimension*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2007 (SNATI 2007). Yogyakarta.
- Sari, Maylia Pramono dan Paulus Basuki Hadiprajitno. 2013. Pengawasan Implementasi "Green Accounting" Berbasis University Social Responsibilities (USR) Di Universitas Negeri Semarang Serta Studi Komparasi Universitas se-Kota Semarang. *Jurnal Akuntansi & Auditing* Volume 9/No. 2/MEI 2013 : 169 – 198
- Siswanto, Bambang dan Adrie Frans Assa. 2013. Pendekatan Kelembagaan Dalam Pengembangan Model Perekonomian Hijau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis* Vol 13 No.2 November 2013
- Susilo, Joko. 2008. Green Accounting Di Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi Kasus Antara Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. *JAAI* Vo; 12 No. 12 Desember 2008.
- Teoh H.Y. dan Thong T.S. 1986. Another Look at Corporate Social Responsibility and Reporting. *Malaysian Management Review*, pp. 35-51.
- Tumiwa, Fabby dan Henriette Imelda. 2012. *Isu Kritis Perpres 61/2011 & 71/2011*. Institute for Essential Services Reform. Jakarta 26 Januari 2012
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Witoelar, Rachmat. 2009. Pencapaian Pembangunan Lima Tahun Terakhir Kementerian Negara Lingkungan Hidup. *Negarawan Jurnal Sekretariat Negara RI* No. 13 Agustus 2009
- Yuniarti, Sari. 2013. Peran Perbankan dalam Implementasi Bisnis Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 17 No. 3 September 2013 <http://www.happenas.go.id/>